

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- B. Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Sernarang: FH-UNDIP, 1989.
- Chatamarrasjid Ais, *Menyingkap Tabir Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008.
- Fred B.G. Tumbuan, *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, Materi Pendidikan Smgkat Hukum Bisnis*, Jakarta: Unika Atmajaya, 2000.
- Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1982.
- Henry Chambell Black, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Mimi: West Publishing Co., 1991.
- Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, Cetakan kesatu, Jakarta: Tatanusa, 2008.

- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Megapoint, 1996.
- Janet Dine, *Company Law*, London: Sweet & Maxweel, 1998.
- K. Wantjik Sakh, *Pelengkap KUHP*, Jakarta: Ghalja Indonesia, 1982.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *Kejahatan Terorganisasi dan kejahatan oleh Organisasi Suatu Tinjauan Dari Segi Kriminologi*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, 1998.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding; Kasasi, Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1984.
- Paul R. Niven. *Balanced Scorecard step by step: Maximizing Performance and Maintaining Results*, New Jersey: John Wiley & Sons. Inc., 2006.
- Pennington Robert R., *Company Law, Fifth Edition*, London: Butterworth, 1985.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, BPHN, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejakung RI, 2006.

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas Bank dan Persero*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Putusan Pengadilan:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 417/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 PK/Pid.Sus/2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.